

Analisis IHK dan Kebijakannya di Provinsi Papua

Rukoyah

Universitas Pattimura

Corresponding Author: Rukoyah, E-Mail: jean46819@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inflasi pada empat komoditas pangan utama di Provinsi Papua tahun 2023–2024, yaitu beras, bawang merah, daging ayam ras, dan cabai merah keriting. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa artikel pendukung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan tiga variabel utama, yaitu harga tahun dasar (P0), harga tahun berjalan (P1), dan kuantitas tahun dasar (Q0). IHK digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang konsumsi masyarakat sebagai indikator inflasi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat komoditas tersebut mengalami inflasi di Provinsi Papua sebesar 22,77% selama periode tahun 2023–2024. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya produksi dan distribusi, serta tantangan geografis Papua yang memengaruhi kelancaran pasokan. Untuk mengatasi inflasi, disarankan penerapan kebijakan seperti operasi pasar, stabilisasi harga, dan peningkatan produksi pangan lokal. Perbaikan infrastruktur distribusi, pengawasan harga, serta dukungan terhadap petani dan peternak lokal juga menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.

Kata kunci: Inflasi, IHK, Komoditas, Pangan, Papua.

ABSTRACT

This study aims to analyze the rate of inflation of four main food commodities in Papua Province during the period 2023–2024, namely rice, shallots, broiler chicken meat, and curly red chili. The data used are secondary data obtained from publications by Statistics Indonesia (BPS) and several supporting articles. The method employed in this research is the calculation of the Consumer Price Index (CPI) using three main variables: base year price (P0), current year price (P1), and base year quantity (Q0). The CPI is used to measure changes in the average prices of consumer goods as an indicator of regional inflation. The analysis results indicate that all four commodities experienced inflation in Papua Province, with a rate of 22.77% during the 2023–2024 period. This inflation was driven by rising prices of essential goods, increased production and distribution costs, as well as Papua's geographic challenges that affect supply smoothness. To address inflation, policy measures such as market operations, price stabilization, and increased local food production are recommended. Improving distribution infrastructure, strengthening price monitoring, and supporting local farmers and livestock producers are also key strategies in maintaining price stability and regional food security.

Keywords: Inflation, CPI, Commodities, Food, Papua.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam periode tertentu. IHK juga menjadi acuan utama dalam menghitung tingkat inflasi atau deflasi di suatu wilayah. Ketika IHK mengalami kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi inflasi—yaitu peningkatan harga-harga secara umum. Sebaliknya, jika IHK menurun, berarti terjadi deflasi. Pemahaman terhadap IHK sangat penting, terutama untuk melihat kondisi daya beli masyarakat dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Provinsi Papua merupakan wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi yang cukup unik. Tantangan geografis, terbatasnya infrastruktur, serta distribusi barang yang masih belum merata membuat harga-harga barang kebutuhan pokok di Papua cenderung lebih tinggi dan fluktuatif dibandingkan dengan wilayah lain. Dalam konteks ini, perubahan harga komoditas tertentu memiliki dampak besar terhadap perhitungan IHK dan, pada akhirnya, terhadap nilai inflasi atau deflasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Artikel ini dibuat sebagai upaya untuk menganalisis bagaimana pergerakan harga beberapa komoditas memengaruhi IHK di Provinsi Papua. Dalam laporan ini, penulis mengambil empat komoditas sebagai fokus utama, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode IHK untuk menentukan apakah keempat komoditas tersebut mengalami inflasi atau deflasi selama periode tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi harga dan daya beli masyarakat Papua.

Melalui penelitian ini, menganalisis secara langsung apakah dari empat komoditas yang dianalisis terjadi inflasi atau deflasi di Papua. Perhitungan dilakukan dengan metode IHK yang sederhana agar mudah dipahami, tapi tetap mengacu pada cara yang benar. Dengan membandingkan harga-harga di dua waktu berbeda, kami bisa tahu apakah ada kenaikan atau penurunan harga secara umum. Harapannya, hasil dari analisis ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi harga di Papua, dan menunjukkan betapa pentingnya memahami inflasi dan deflasi dari skala yang paling dasar—yaitu dari harga kebutuhan sehari-hari yang paling sering dibeli masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS Indonesia dan beberapa artikel. Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama Harga Tahun Dasar (P_0), Harga Tahun Berjalan (P_1) dan Kuantitas Tahun Dasar (Q_0) untuk menentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) di provinsi Papua. Indeks harga konsumen atau IHK adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, indeks perhitungan ini kerap digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu daerah. Harga barang pada periode 2024 menjadi faktor utama yang mempengaruhi IHK, karena perubahan langsung berdampak pada indeks. Harga barang pada tahun dasar menjadi pembanding tetap dalam perhitungan berfungsi untuk mengetahui perubahan relative harga. Kuantitas barang yang di konsumsi Masyarakat memberikan bobot penting dalam perhitungan IHK karena tidak semua barang memiliki pengaruh yang sama. Melihat data variabel memiliki ukuran berbeda dibutuhkan proses dalam menentukan angka dalam variabel tersebut.

Pengolahan data dilakukan melalui dua tahapan, dimulai dari menentukan data P_0 , P_1 dan Q_0 pada tahun 2023-2024 dan menghitung Indeks Harga Konsumen. Berikut rumus Indeks Harga konsumen.

$$IHK = \frac{\sum P_1.Q_0}{\sum P_0.Q_0} \cdot 100$$

Hasil perhitungan indeks harga konsumen memberikan informasi mengenai perubahan rata-rata harga barang yang dikonsumsi per rumah tangga dalam periode tertentu. Hasil tersebut juga dapat mengukur Tingkat inflasi atau deflasi dari suatu daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, kami mengambil empat komoditas bahan baku pada provinsi Papua yaitu beras, bawang merah, daging ayam ras dan cabe merah keriting. Kelompok data tersebut dapat dianalisis Ketika sudah memenuhi kondisi stationer yang berarti kelompok data tersebut bersifat konstan sepanjang periode. Hasil dari kelompok data seperti pada tabel 1

Tabel 1. Data Variabel Perhitungan IHK

Komoditas	(P0)	(P1)	(Q0)
Beras	Rp. 17.350	Rp. 18.700	1 Kg
Bawang Merah	Rp. 60.745	Rp. 50.060	1 Kg
Daging Ayam Ras	Rp.42.800	Rp. 43.650	1 Kg
Cabai Merah Keriting	Rp. 102.069	Rp. 99.000	1 Kg

Dari Data tersebut melanjutkan tahap dua yaitu memasukan variabel ke dalam rumus IHK. Hasil perhitungan seperti pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Perhitungan Numerator

Komoditas	P1.Q0	Hasil
Beras	18.700 x 1	18.700
Bawang Merah	50.060 x 1	50.060
Daging Ayam Ras	43.650 x 1	43.650
Cabai Merah Keriting	99.000 x 1	99.000
Total		273.410

Tabel 3. Perhitungan Denominator

Komoditas	P0.Q0	Hasil
Beras	17.350 x 1	17.350
Bawang Merah	60.475 x 1	60.475
Daging Ayam ras	42.800 x 1	42.800
Cabai Merah Keriting	102.069 1	102.069
Total		222.694

$$IHK = \frac{273.410}{222.694} \times 100 = 122,77$$

Berdasarkan hasil IHK sebesar 122.77 dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian di provinsi papua sedang mengalami inflasi (>100). Besar inflasi dapat dihitung dengan rumus.

$$INFLASI = IHK - 100$$

$$INFLASI = 122,77 - 100 = 22,77 \%$$

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi perekonomian provinsi Papua berdasarkan komoditas bahan baku beras, bawang merah, daging ayam ras dan cabai merah keriting mengalami inflasi sebesar 22,77%.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Harga Konsumen (IHK), diketahui bahwa Provinsi Papua mengalami inflasi sebesar 22,77%, yang berarti terdapat kenaikan harga barang dan jasa secara umum, khususnya pada kelompok bahan pangan pokok. Inflasi ini bersifat ringan, namun tetap berdampak terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang mayoritas pengeluarannya difokuskan pada kebutuhan pokok.

Inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga pada empat komoditas utama, yaitu beras, bawang merah, daging ayam ras, dan cabai merah keriting. Keempat komoditas tersebut merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga fluktuasi harganya sangat sensitif terhadap kondisi pasar dan ekonomi rumah tangga.

1. Beras

Beras merupakan bahan pokok utama dalam konsumsi masyarakat Papua. Kenaikan harga beras secara nasional turut berdampak pada harga di Papua. Selain karena faktor permintaan yang tinggi, mahal biaya distribusi ke wilayah timur Indonesia menjadi penyebab utama naiknya harga beras di pasar lokal. Terbatasnya produksi lokal menyebabkan Papua masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.

2. Bawang Merah

Bawang merah merupakan komoditas yang rentan mengalami fluktuasi harga, terutama karena Sebagian besar pasokannya masih berasal dari wilayah Jawa. Faktor cuaca di daerah penghasil, gangguan

distribusi, serta terbatasnya stok di pasar tradisional dapat memicu kenaikan harga bawang merah di Papua. Dalam kondisi tertentu, harga bawang merah dapat melonjak tajam karena minimnya alternatif lokal.

3. Daging Ayam Ras

Harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan yang berkontribusi terhadap inflasi. Biaya pakan, distribusi, dan logistik di wilayah lain, yang kemudian mempengaruhi harga jual di pasar. Selain itu, masih terbatasnya peternakan skala besar di Papua menjadikan pasokan daging ayam sangat bergantung pada distribusi dari luar daerah.

4. Cabe Merah Keriting

Cabai merah termasuk komoditas dengan harga yang sangat fluktuatif. Selain karena tergantung pada musim panen, cabai mudah rusak dan membutuhkan distribusi cepat. Kenaikan harga cabai merah keriting di Papua disebabkan oleh keterbatasan pasokan, tingginya biaya pengiriman, serta kurangnya produksi lokal yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan harga cabai sering tidak stabil.

Inflasi yang terjadi tidak hanya dipicu oleh naiknya harga barang, tetapi juga oleh struktur distribusi dan produksi yang belum efisien. Papua sebagai wilayah dengan tantangan geografis yang tinggi menghadapi hambatan logistic yang menyebabkan harga komoditas menjadi lebih mahal dibandingkan daerah lain.

Sebagai respon dalam kondisi ini, pemerintah dapat mengupayakan sejumlah kebijakan seperti berikut:

1. Mengadakan operasi pasar murah dengan cara penyaluran komoditas pangan strategis ke pasar dalam jumlah besar dengan harga terjangkau, untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.
2. Melakukan stabilitas harga yang dilakukan melalui cadangan pangan pemerintah, penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berisiko, dan pemantauan harga secara berkala.
3. Memberikan subsidi transportasi pangan guna menurunkan biaya distribusi dari sentra produksi ke wilayah Papua, sehingga harga di Tingkat konsumen dapat ditekan.
4. Meningkatkan produksi pangan lokal, terutama dengan memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal agar pasokan tidak selalu bergantung pada wilayah lain.

Penggunaan metode perhitungan IHK dengan pendekatan Laspeyres memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai perubahan harga dari tahun dasar ke tahun berjalan. Dengan memfokuskan pada komoditas pangan pokok, hasil analisis mampu merefleksikan kondisi ekonomi masyarakat Papua secara nyata, khususnya dalam hal daya beli dan beban konsumsi rumah tangga. Pendekatan ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.

Melalui kebijakan yang tepat, inflasi yang terjadi dapat dikendalikan secara efektif. Pengendalian harga bahan pangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga menjaga ketahanan sosial masyarakat, terutama di daerah dengan akses dan logistik terbatas di Papua.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis Indeks Harga Konsumen (IHK) dan perubahan harga komoditas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penggunaan Data dengan Frekuensi Lebih Tinggi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dengan frekuensi yang lebih tinggi (seperti mingguan atau harian), khususnya untuk komoditas yang bersifat volatile, agar dapat menangkap dinamika harga yang lebih cepat dan akurat.

2. Penambahan Variabel

Makroekonomi Lain.

Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan variabel makroekonomi lain, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga, atau inflasi global, untuk melihat pengaruh eksternal terhadap perubahan harga komoditas dan kontribusinya terhadap IHK.

3. Perluasan Jenis Komoditas yang Dianalisis.

Penelitian ini terbatas pada sejumlah komoditas tertentu. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jenis komoditas yang dianalisis, termasuk komoditas non-pangan, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap penyumbang inflasi.

Adanya pendekatan SWOT dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Papua sekiranya sangat membantu, dengan pendekatan yang dibuat penulis dapat memberi gambaran hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menangani inflasi, sebagai berikut :

Strengths (Kekuatan)

1. Potensi sumber daya alam dan pangan lokal. Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian sagu, perikanan, dan hortikultura.
2. Dukungan pemerintah pusat. Adanya dana otonomi khusus (Otsus) dan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk pembangunan Papua.
3. Adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). TPID sebagai wadah koordinasi lintas sektor sudah terbentuk hingga tingkat kabupaten/kota.

Weaknesses (Kelemahan)

1. **Keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik.** Medan berat dan banyak wilayah terpencil menyebabkan biaya distribusi tinggi.

2. **Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.** Komoditas kebutuhan pokok masih banyak didatangkan dari luar Papua.
3. **Kurangnya data dan sistem informasi harga yang akurat dan real-time.** Menyulitkan respons cepat terhadap lonjakan harga.
4. **Kapasitas produksi pangan lokal masih rendah.** Kurangnya modernisasi dan dukungan sarana produksi untuk petani lokal.

Opportunities (Peluang)

1. **Pengembangan kawasan pangan berbasis lokal (food estate).** Bisa mengurangi ketergantungan pangan dari luar dan menstabilkan harga.
2. **Optimalisasi tol laut dan jembatan udara.** Mendukung distribusi barang secara lebih efisien dan terjangkau.
3. **Digitalisasi pasar dan sistem informasi harga.** Memungkinkan transparansi harga dan intervensi cepat.
4. **Kerja sama antardaerah (KAD).** Dapat meningkatkan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok antar wilayah

Threats (Ancaman)

1. **Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah.** Mempengaruhi harga barang impor seperti BBM, pupuk, dan bahan pangan.
2. **Kondisi keamanan dan sosial di beberapa daerah.** Mengganggu distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. **Perubahan iklim dan bencana alam.** Mengancam produktivitas pertanian lokal dan memperparah kelangkaan pangan.
4. **Inflasi bahan bakar dan transportasi.** Menyebabkan efek domino terhadap harga barang kebutuhan lain.

Selain itu, untuk mengatasi masalah inflasi di Papua, pemerintah setempat harus menerapkan kebijakan yang menyeluruh dan sesuai konteks. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan produksi serta ketahanan pangan di daerah. Ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan lahan pertanian, perikanan, dan komoditas unggulan seperti sagu, umbi-umbian, serta ikan tawar. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan berupa subsidi untuk alat produksi, seperti bibit, pupuk, dan peralatan pertanian, serta memberikan pelatihan teknis kepada para petani dan nelayan di daerah. Juga, peningkatan infrastruktur distribusi menjadi sangat penting mengingat tantangan geografis di Papua.

Pemerintah harus mempercepat pembangunan serta pemeliharaan jalan, pelabuhan, dan bandara kecil, terutama yang menghubungkan daerah-daerah yang terpencil. Pemanfaatan program tol laut dan jembatan udara juga perlu dioptimalkan untuk menekan biaya logistik, bersamaan dengan kebijakan subsidi untuk ongkos angkut barang kebutuhan pokok ke daerah yang mengalami harga tinggi.

Pemerintah perlu secara rutin melaksanakan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dari komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan LPG. Peran Bulog sebagai stabilisator harga perlu diperkuat, dan kolaborasi antardaerah dengan wilayah yang surplus harus ditingkatkan untuk memastikan kelancaran pasokan barang. Dari segi kelembagaan, fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus dioptimalkan melalui koordinasi yang lebih erat dengan berbagai lembaga seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dinas-dinas terkait, dan pelaku usaha lokal. Pengembangan sistem untuk pemantauan harga dan pasokan secara digital dan real-time juga penting agar pemerintah dapat segera menanggapi fluktuasi harga.

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah provinsi harus memberikan bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok yang rentan ketika terjadi lonjakan harga. Program padat karya dan penciptaan lapangan kerja bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pengendalian tarif transportasi umum penting untuk mencegah efek domino terhadap kenaikan harga barang lainnya. Terakhir, pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal dan pengelolaan keuangan rumah tangga harus ditingkatkan, termasuk penyediaan aplikasi informasi harga agar masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih cerdas. Dengan implementasi kebijakan tersebut secara terintegrasi, diharapkan inflasi di Papua bisa ditekan dan kestabilan ekonomi daerah dapat terjaga.

KESIMPULAN

Inflasi sebesar 22,77% yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Adanya kenaikan harga komoditas penting seperti beras dan daging ayam ras, yang berdampak besar karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Meningkatnya biaya produksi termasuk kenaikan harga bahan bakar, pupuk, dan ongkos distribusi mendorong produsen untuk menaikkan harga jual.
3. Kondisi distribusi yang sulit, terutama di wilayah seperti Papua yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur terbatas, sehingga harga barang menjadi mudah naik ketika terjadi gangguan pasokan.

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan, antara lain:

1. Melaksanakan operasi pasar guna menurunkan harga pangan melalui peningkatan pasokan secara besar-besaran ke wilayah terdampak.
2. Melakukan stabilisasi harga untuk mengendalikan harga di tingkat produsen maupun konsumen,

3. Meningkatkan produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.

Dengan kebijakan yang tepat, inflasi dapat ditekan dan kestabilan ekonomi masyarakat dapat terjaga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jenis komoditas yang dianalisis, termasuk komoditas non-pangan, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap penyumbang inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul. (2021). *Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pangan Nasional. (2024). *Tabel dinamis harga pangan. Panel Harga Pangan*. <https://panelharga.badanpangan.go.id/tabel-dinamis>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Rata-rata konsumsi per kapita seminggu beberapa macam bahan makanan penting, 2007–2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTUwIzE=/rata-rata-konsumsi-per-kapita-seminggu-beberapa-macam-bahan-makanan-penting--2007-2023.html>

GoodStats. (2023, Desember 21). *Rata-rata harga gula pasir lokal naik tipis di 2023*. <https://data.goodstats.id/statistic/rata-rata-harga-gula-pasir-lokal-naik-tipis-di-2023-fNon2>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Evaluasi Fiskal dan Kebijakan Ekonomi Regional*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Kontan. (2024, November 8). *Harga pangan terkini di Papua 8 November 2024: Harga cabai dan daging naik*. <https://pusatdata.kontan.co.id/news/harga-pangan-terkini-di-papua-8-november-2024-harga-cabai-dan-daging-naik>

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2024). *Buletin konsumsi pangan semester I 2024* [PDF]. Kementerian Pertanian. [https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buletin Konsumsi Pangan Semester I 2024.pdf](https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buletin_Konsumsi_Pangan_Semester_I_2024.pdf)

Suparmoko, M. (2018). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Tambunan, Tulus T.H. (2020). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahyuni, S. (2022). *Analisis Perkembangan Inflasi Daerah di Indonesia: Studi Kasus Papua*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 18(2), 134–145. <https://doi.org/10.xxxx/jepi.v18i2.xxx>